

TOTEMISASI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT LAMPUNG DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL

Mutia Ainun Nabila, Munawar Ahmad, Riski Mayang Sari, Riko Firdaus, Hanifatunnisa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mutiaanabila8@gmail.com

Abstrak

Kearifan lokal telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Lampung merupakan salah satu provinsi yang multikultural, dengan beragam kearifan lokal didalamnya. Masyarakat yang multikultural sangat rentan sekali terjadi konflik. Dalam menghadapi konflik, kearifan lokal kerap kali digunakan sebagai resolusi permasalahan secara damai. Beberapa bentuk kearifan lokal yang ada di Lampung dapat dijadikan sebagai bentuk preventif konflik sosial ataupun keagamaan yang timbul pada masyarakat Lampung baik ulun Lampung (masyarakat asli) maupun pendatang diantaranya yaitu piil pesenggiri, ippun aneg, serta semboyan masyarakat Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai. Beberapa bentuk kearifan lokal tersebut mengandung makna yang baik namun pada kenyataannya provinsi Lampung yang multikultural masih sering terjadi konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber terkait kearifan lokal dan resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Lampung tidak mampu digunakan untuk meminimalisir terjadinya konflik di Lampung dikarenakan disfungsi yang terjadi pada masyarakat Lampung.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Resolusi Konflik, Identitas

Abstract

Local wisdom has long been part of the culture of society in various regions in Indonesia. Local wisdom includes values, norms and habits that grow and develop in a society. Lampung is a multicultural province, with a variety of local wisdom in it. A multicultural society is very vulnerable to conflict. In dealing with conflict, local wisdom is often used to resolve problems peacefully. Several forms of local wisdom in Lampung can be used as a form of prevention of social or religious conflicts that arise in Lampung society, both ulun Lampung (indigenous people) and immigrants, including piil pesenggiri, ippun aneg, and the motto of the Lampung people, Sai Bumi Ruwa Jurai. Some forms of local wisdom contain good meanings, but in reality, the multicultural province of Lampung still often experiences conflict. The research method used is a literature study from various sources related to local wisdom and conflict resolution. The results of the research show that the local wisdom of the Lampung community cannot be used to minimize the occurrence of conflict in Lampung due to the dysfunction that occurs in the Lampung community.

Keywords: Local Wisdom, Conflict Resolution, Identity

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi terjadinya konflik. Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, baik itu konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal merujuk pada konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, seperti konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, misalnya di Papua, Poso, Sambas, dan Sampit. Sementara itu, konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Biasanya, konflik ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, contohnya konflik dengan para buruh, konflik di Aceh, serta daerah-daerah yang muncul gerakan separatisme (Astri, 2011, p. 153).

Konflik merupakan hal yang alami terjadi dalam kehidupan manusia, terutama dalam interaksi sosial. Konflik bisa menjadi sesuatu yang positif dan memicu perkembangan yang baik, namun di sisi lain juga bisa menjadi masalah yang merusak atau destruktif dan merugikan manusia. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan atau heterogenitas (Saepudin, 2017, p. 152). Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial kemasyarakatan juga dapat memicu terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan muncul karena adanya ketidakharmonisan yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Konflik yang terjadi biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan atau tanpa kekerasan.

Kearifan lokal telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam menghadapi konflik, kearifan lokal sering digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi resolusi konflik jangka panjang dan berkelanjutan yang berbasis pada identitas budaya lokal.

Masyarakat Lampung memiliki beragam suku, adat, dan kepercayaan yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Lampung. Provinsi Lampung dikenal memiliki keragaman suku dan adat istiadat. Tercatat ada sekitar 9 suku asli Lampung, yaitu Sai Batin, Pubian Telu Suku, Abung Siwo Mego Pak Tulang, Peminggir, Krui Melinting, Semaka, Jawa-Samin, dan Pesisir (Bumi).

Arus modernisasi dan pengaruh budaya luar telah mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Lampung. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, potensi konflik horizontal di tengah masyarakat Lampung pun semakin tinggi. Hal ini terlihat dari maraknya perkelahian antar pemuda, pertikaian antar warga, hingga bentrokan antar suku yang sering terjadi. Oleh karena itu, upaya preventif melalui penggalian kembali nilai-nilai kearifan lokal Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menanamkan kembali pemahaman mengenai falsafah hidup, prinsip kebersamaan, sikap toleransi, hingga cara penyelesaian konflik secara damai yang terkandung dalam kearifan lokal, diharapkan dapat meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat Lampung.

Tradisi dan budaya lokal pada umumnya memang mengajarkan perdamaian hidup yang selaras dengan lingkungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan pendapat I Ketut Gobyah, yang menyatakan bahwa pada dasarnya kearifan lokal memang diturunkan secara turun-temurun. Di dalamnya terkandung norma-norma yang mengajarkan kerukunan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat.

Pendekatan kearifan lokal memang tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, kearifan lokal tetap berfokus pada pendekatan budaya, dengan memanfaatkan nilai dan budaya lokal yang telah dimiliki oleh masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh S. Swarsi Geriya, kearifan lokal terdiri dari nilai-nilai, etika, dan perilaku yang telah melembaga secara tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup bersama dalam suatu tatanan nilai akan saling melengkapi aturan-aturan mereka dengan sejumlah kebijakan lokal yang telah membudaya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul akibat kesalahpahaman.

Kearifan lokal menjadi media yang paling efektif untuk menemukan solusi dalam penyelesaian konflik. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat yang terlibat konflik untuk berdiskusi dan menegosiasikan keinginan masing-masing terhadap pihak lain. Pendekatan ini akan memberikan pengaruh terhadap bentuk penyelesaian yang dianggap mungkin dan tepat, serta dapat dijadikan sebagai peringatan dini terhadap konflik (*conflict early warning system*).

Beberapa kearifan lokal Lampung dapat dijadikan sebagai cara atau strategi untuk mengurangi konflik yang ada di Lampung, yang notabene merupakan salah satu provinsi yang rentan terhadap konflik. Penyelesaian konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal selama ini telah membudaya dalam masyarakat dan merupakan langkah yang tepat. Sriyanto menilai bahwa penyelesaian konflik berbasis budaya sangat tepat jika menggunakan adat karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Kearifan lokal adalah sistem yang telah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi pada hal-hal profan semata, tetapi juga bersifat sakral, sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan kearifan lokal ini, resolusi konflik dapat terwujud dengan cepat dan diterima oleh semua kelompok, sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat (Sriyanto, 2007, p. 7).

Pada tulisan ini, akan dibahas lebih dalam mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup di masyarakat Lampung beserta potensinya sebagai upaya preventif terhadap konflik sosial. Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan langkah konkret bagi pemangku kepentingan dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Lampung yang majemuk. Dengan demikian, diharapkan nilai-nilai kearifan lokal Lampung tetap terjaga dan mampu menjadi perekat sosial masyarakat. Berbagai bentuk local wisdom yang ada pada masyarakat Lampung di dalamnya termuat nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai upaya untuk mencegah konflik sosial yang sering terjadi di daerah Lampung.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi literatur dari berbagai sumber terkait kearifan lokal dan resolusi konflik. Peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang fokus kajiannya adalah pustaka atau literatur. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang relevan atau berkaitan. Adapun yang menjadi objek lokasi penelitian adalah Provinsi Lampung, yang memiliki beragam kearifan lokal serta dikenal sebagai wilayah yang multikultural. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis data.

A. Kearifan Lokal Lampung

Secara etimologis, kearifan (*wisdom*) adalah kemampuan individu untuk menggunakan akal pikirannya dalam merespons suatu objek, keadaan, peristiwa, atau kejadian. Sementara itu, lokal merujuk pada ruang atau tempat terjadinya interaksi. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai dan norma yang berlaku, diyakini, serta dijadikan pedoman dalam bertindak oleh suatu kelompok masyarakat. Kearifan lokal merupakan pemberdayaan potensi nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur dan mengandung kebaikan secara arif dan bijaksana demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri (Ruslan, 2018, p. 117). Kearifan lokal mencakup kebijakan hidup, pandangan hidup (*way of life*), yang mengakomodasi kebijaksanaan (*wisdom*) dan kearifan hidup.

Sartini mendefinisikan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai gabungan dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, serta tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004, pp. 111-120). Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Kearifan

lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.

Masyarakat Lampung memiliki beberapa kearifan lokal yang telah menjadi identitas bagi mereka serta dijadikan sebagai falsafah hidup orang Lampung. Di antaranya adalah semboyan "*sai bumi ruwa jurai*"; "*piil pesenggiri*", dan "*ippun aneg*".

1. Semboyan Sang Bumi Ruwa Jurai

Lampung memiliki semboyan "*Sai Bumi Ruwa Jurai*" yang berarti bumi kediaman mulia yang dihuni oleh dua golongan adat istiadat dengan asal usul berbeda, yaitu Pepadun dan Saibatin. Namun, seiring dengan perubahan zaman yang dinamis, semboyan ini mengalami pergeseran makna, yang kini berarti bumi kediaman mulia yang ditempati oleh dua golongan, yaitu pribumi dan pendatang (Salim, 2023, p. 104). Struktur sosial masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Pepadun dan Saibatin, yang masing-masing memiliki tatanan berbeda dalam hal keanggotaan kelompok suku, seperti pengucapan lisan, dialek bahasa, pakaian adat, tempat tinggal, dan kehidupan sosial. Saibatin lebih mengarah pada sistem aristokrasi, sedangkan Pepadun menganut sistem demokrasi dan adat istiadat dalam pemberian gelar.

Masyarakat Lampung merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki dua kelompok etnis yang berbeda, yaitu masyarakat Pesisir (pesisir) dan Pepadun (pedalaman), yang hidup rukun meskipun terdapat perbedaan. Masyarakat Pesisir tinggal di sepanjang pesisir pantai Lampung, sementara masyarakat Pepadun tinggal di dataran tinggi provinsi tersebut. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang jelas dalam bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Semboyan Sai Bumi Ruwa Jurai mewakili persatuan antara dua kelompok etnis serta keberagaman dan keharmonisan masyarakat yang tinggal di provinsi tersebut. "*Sai Bumi Ruwa Jurai*" sebagai semboyan menandakan identitas asli leluhur masyarakat Lampung, yang berarti Satu Bumi Dua Jiwa (Kemendikbud, 2023).

Sai Bumi Ruwa Jurai sebagai semboyan masyarakat Lampung merepresentasikan kehidupan multikultural di Lampung. Jumlah penduduknya sekitar 8.036.000 jiwa, dengan berbagai etnis yang mendiami Provinsi Lampung, di antaranya etnis Jawa (65%), penduduk asli Lampung (13,56%), etnis Sunda (9,61%), etnis dari Sumatera Selatan (5,40%), serta sisanya etnis Minangkabau dan Bali. Agama-agama yang diakui negara juga semuanya ada di Lampung, mulai dari Islam (93,55%), Kristen Protestan (2,32%), Hindu (1,63%), Katolik (1,62%), Buddha (0,87%), hingga Konghucu (0,01%). Heterogenitas masyarakat Lampung juga terlihat dari bahasa, tetapi karena berasal dari etnis yang berbeda-beda, untuk berkomunikasi, masyarakat Lampung menggunakan Bahasa Indonesia.

Sai Bumi Ruwa Jurai tidak hanya berfungsi sebagai semboyan masyarakat Lampung saja, tetapi lebih dari itu. Dengan adanya motto hidup masyarakat Lampung, yaitu Sai Bumi Ruwa Jurai, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Lampung, setidaknya masyarakat Lampung, baik asli maupun pendatang, menyadari bahwa meskipun ada perbedaan, hal itu tidak menyebabkan masyarakat Lampung yang berbeda untuk saling bertikai. Masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup bersama di tengah perbedaan.

2. Piil Pesenggiri

Menurut Ahmad Zarkasi, kata *piil* berasal dari kata *fi'il* dalam bahasa Arab yang berarti perbuatan, tindakan, atau perilaku. Sementara itu, kata *pesenggiri* berasal dari kata *pusenggikih* yang berarti simpang siur atau pertemuan di satu titik saat simpang siur, atau dengan kata lain, "pertemuan sejajar pada garis lurus". *Piil Pesenggiri* dimaknai sebagai

perilaku orang yang beretnis Lampung yang dalam kehidupan bermasyarakat selalu ingin sejajar dengan orang lain (Zarkasi, 2014, p. 71).

Piil Pesenggiri merupakan satu kesatuan yang terdiri dari empat unsur, yaitu *juluk adek/adok*, *nemui nyimah*, *nengab nyappur*, dan *sakai sambayan*. Keempat unsur tersebut merupakan modal dasar dan sebagai penyangga bagi seseorang untuk menegakkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Seseorang dikatakan *bepiil* jika telah menjalankan keempat nilai-nilai dalam unsur tersebut.

Piil Pesenggiri merupakan tradisi masyarakat Lampung sebagai landasan hidup dari aktivitas kebudayaan masyarakat Lampung yang masih berlangsung hingga sekarang. Masyarakat Lampung dikenal dengan filosofi hidup yang disebut nilai-nilai budaya tersebut, yang jelas termaktub dalam kitab lama peninggalan para leluhur, meliputi *Kitab Kuntara Rajaniti* dan *Kitab Buku Handak*, yang berisi tentang aturan, norma, serta anjuran dan sanksi yang sebaiknya menjadi landasan kehidupan sehari-hari orang Lampung. Sifat dan karakter orang Lampung yang tertulis dalam *Kitab Kuntara Rajaniti* meliputi: (1) rasa malu untuk melakukan sikap yang tercela menurut agama dan lingkungan sosial-budaya; (2) *juluk adok* yakni kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya; (3) *nemui nyimah* adalah sikap saling beramah tamah dengan tamu; (4) *nengab nyappur* ialah perilaku aktif dalam bermasyarakat serta tidak individualis; dan terakhir (5) *sakai sambayan* yaitu gotong royong dan saling membantu. Acuan kesempurnaan sifat ideal tersebut di atas merupakan sikap dan watak yang diharapkan dimiliki oleh orang Lampung.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Iskandar Syah, *Piil Pesenggiri* secara harfiah berarti perbuatan atau tindakan manusia yang agung dan luhur dalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sementara itu, dalam dokumen literatur resmi, *piil pesenggiri* diartikan sebagai segala sistem yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas, *piil pesenggiri* mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong, dan bernama besar (Minandar, 2019, pp. 248-249).

3. Piil Pesenggiri

Ippun Aneg (Rembuk Desa dan Kelurahan) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen lainnya yang ada di masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan masalah yang muncul antara penduduk lokal atau masalah-masalah sosial lainnya yang berpotensi menimbulkan persoalan di masyarakat dengan mengedepankan prinsip *nemui nyimah (Suwardi, 2021, p. 7). *Ippun Aneg* adalah forum rembuk, bermusyawarah, atau bermufakat untuk memecahkan masalah yang berpotensi menimbulkan konflik. *Ippun Aneg* tidak hanya dilaksanakan saat konflik terjadi, tetapi juga dilakukan untuk mencegah munculnya konflik itu sendiri.

Ippun Aneg ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

1) *Pengayoman*, yang mengandung makna bahwa pelaksanaan *Ippun Aneg* tidak terlepas dari upaya melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia serta mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat secara proporsional.

2) *Kekeluargaan*, pelaksanaan *Ippun Aneg* mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan.

3) *Guna Kewajiban* (kegunaan dan kehasilan), diharapkan dapat meningkatkan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan terwujudnya kepastian hukum.

4) *Keterbukaan*, pelaksanaan *Ippun Aneg* harus melibatkan semua elemen sejak dari proses, perencanaan, hingga kegiatan pengawasan. Elemen di sini termasuk juga pemerintah desa atau kelurahan, keamanan, dan elemen masyarakat lainnya.

5) *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*, mengutamakan kearifan lokal (nilai-nilai kedaerahan) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

6) *Keamanan dan ketertiban*, harus dilaksanakan secara berkala untuk menciptakan dan memberikan rasa aman, tentram, dan damai di tengah-tengah masyarakat, baik saat ada maupun tidak ada konflik.

Ippun Aneq (rembuk desa dan kelurahan) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik, bukan hanya konflik antara penduduk asli dan pendatang, tetapi juga konflik yang terjadi dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Penyelesaiannya dilakukan oleh tokoh adat Lampung secara bersama-sama dengan unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, tokoh lintas adat, dan unsur masyarakat lainnya (Suwardi, 2021, p. 8).

Masyarakat Lampung, melalui tokoh adatnya, mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan konflik dengan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik melalui acara adat Lampung, yaitu *Belgawi* atau *Mewakbi*, sehingga pihak-pihak yang berkonflik akan terikat dalam tali persaudaraan. Jika dilihat dari proses dan pelaksanaan *Ippun Aneq* (rembuk desa dan kelurahan), maka penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang dilakukan dengan mediasi yang melibatkan mediator dalam menyelesaikan masalah.

B. Konsep Totemisme Emile Durkheim

Émile Durkheim adalah seorang sosiolog yang mempelajari agama dan masyarakat primitif. Salah satu teori Durkheim tentang agama adalah totemisme. Menurut Durkheim, dalam totemisme terdapat tiga objek yang dianggap suci, yaitu totem, lambang totem, dan para anggota suku itu sendiri. Totem bagi masyarakat primitif menempati posisi sebagai sesuatu yang sakral, oleh karena itu ia terpisah atau terisolasi dari hal-hal yang profan. Sebagai sesuatu yang memiliki tingkat kesakralan yang tinggi, totem akan sangat berpengaruh, dan di situlah mereka diikat dengan keyakinan bahwa apa yang menjadi totem adalah sesuatu yang penting. Totem bagi Émile Durkheim adalah simbol klan dan Tuhan sekaligus, karena Tuhan dan klan pada dasarnya adalah hal yang sama. Penyembahan terhadap Tuhan atau dewa-dewa sebenarnya adalah cara masyarakat primitif mengekspresikan kesetiaan kepada klan (Thayer, 1981, p. 595).

Totem atau dikenal dengan penyebutan simbol. Kata simbol sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu *sumballelo*, *sumballein*, atau *sumballesthai*, yang berarti berunding, berdebat, merenungkan, bertemu, membantu, berwawancara, melemparkan menjadi satu, menyusun atau menyatukan, menetapkan, menggabungkan, menyetujui, membandingkan, menjelaskan, menafsir, atau mengapresiasi. Simbol juga berarti menyatukan dua hal lalu menjadi satu. Kata ini berasal dari suatu kegiatan praktis pada masa lampau berupa sebuah cincin, koin, atau lempengan tanah liat yang dibagi menjadi dua, yang bertujuan untuk menggandakan perjanjian antara dua pihak (Savickas, 1980, pp. 2-3). Setengah berarti pelengkap dari setengah yang lainnya. Kegiatan praktis dalam bentuk potongan sesuatu bagian dengan maksud untuk membandingkan dan mencocokkan pasangan adalah awal keberadaan simbol. Potongan-potongan dari sesuatu unit yang dibagi, keduanya disebut simbol.

Menurut Durkheim sendiri, dalam suatu pemujaan terdapat sistem yang lebih primitif dan fundamental, yaitu apa yang disebut sebagai totemisme. Kata totem baru muncul dalam etnografi menjelang abad ke-18. Pertama kali kata ini muncul dalam buku penafsiran Indian karya J. Long yang diterbitkan di London tahun 1791 (Durkheim, p. 126). Pemujaan totemisme ini ditemukan Durkheim ketika ia meneliti suku di Australia yang terbagi berdasarkan kolektif. Marga adalah suatu kelompok yang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan kolektif. Ada dua ciri marga, yaitu: pertama, individu-individu yang menjadi anggotanya merasa terikat oleh hubungan kekeluargaan. Ikatan ini sangat khas, karena mereka terikat dengan memakai nama yang sama. Hal ini disebabkan karena secara kolektif mereka ditandai dengan kata atau nama yang sama. Setiap marga suku yang

sama memiliki totem yang berbeda-beda, dan objek-objek yang dijadikan sebagai totem berasal dari dunia binatang atau tumbuhan. Totem biasanya bukan bersifat individual, melainkan spesies atau ragam. Para leluhur dihadirkan dalam bentuk mitos sebagai bagian dari marga yang mengambil bentuk binatang atau tumbuhan (Durkheim, p. 154).

Totem umumnya tidak bersifat individual, melainkan beragam (Durkheim, p. 158). Totem bukan sekadar nama, melainkan sebuah lambang yang mirip dengan lencana pengenal untuk menunjukkan identitas tertentu. Jika terdapat dekorasi-dekorasi totemik, hal ini menunjukkan bahwa totem bukan hanya sekadar nama atau lambang saja. Totem-totem tersebut digunakan dalam upacara-upacara religius sehingga totem itu kemudian memiliki label kolektif dan sekaligus memiliki karakter religius. Segala sesuatu yang diklasifikasikan sebagai yang Sakral dan yang Profan akan merujuk pada totem tersebut (Durkheim, pp. 170-178). Tumbuhan atau binatang yang sering dipakai sebagai totem didasarkan pada objek yang riil, keprofanan tumbuhan dan binatang terletak pada fungsinya. Pada tahapan seseorang menggunakan tumbuhan atau binatang sebagai totemnya, keidentikan dalam nama juga menandakan keidentikan dalam hakikat. Bagi masyarakat primitif, nama bukan hanya sekadar kata, melainkan menjadi sebuah benda dan merupakan bagian yang sangat esensial (Durkheim, pp. 191-200).

Bagi Durkheim, totem merupakan sebuah simbol, ungkapan, dan ekspresi yang kasat mata. Ia mengekspresikan dan menyimbolkan dua hal yang berbeda (Durkheim, p. 155). Pertama, totem merupakan bentuk luar dan kasat mata dari apa yang diistilahkan dengan prinsip totemik atau Tuhan. Kedua, totem juga merupakan sebuah simbol dari masyarakat. Namun, walaupun totem menyimbolkan dua hal yang berbeda, ada suatu rasa respect yang sama yang ditimbulkannya dalam diri setiap individu. Respect yang ditimbulkan terhadap sesuatu yang divinitas sama dengan respect yang ditimbulkan setiap individu atau anggota terhadap masyarakatnya. Maka, prinsip totemik bagi marga adalah marga atau masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang diimajinasikan dalam wujud fisik tumbuhan atau binatang yang kemudian dijadikan totem. Oleh karena itu, setiap individu harus mematuhi aturan-aturan tingkah laku dan pikiran yang dibentuk oleh masyarakat, sebagai bentuk rasa hormat dan respect yang tinggi terhadap masyarakat (Durkheim, p. 305).

Bagi Emile Durkheim, totem adalah simbol klan dan Tuhan sekaligus, karena Tuhan dan klan pada dasarnya adalah hal yang sama. Penyembahan terhadap Tuhan atau Dewa-dewa sebenarnya adalah bagaimana masyarakat primitif mengekspresikan dan mempraktikkan kepercayaan mereka kepada klan. Binatang atau tumbuh-tumbuhan yang digunakan menjadi totem karena klan tidak menginginkan sesuatu yang akan jadi simbol berasal dari hal-hal yang jauh dan membingungkan. Yang diperlukan adalah objek yang spesifik, nyata, dan dekat dengan keseharian masyarakat. Tujuan utama totemisme adalah untuk menyatakan kesalingterkaitan berbagai hal, hubungan-hubungan yang sangat rumit yang mengikat seseorang dengan orang lain di dalam klan, kaitan klan dengan alam fisik, dan akhirnya kaitan-kaitan antara berbagai fenomena alam itu sendiri. Maka, dipahami bahwa prinsip-prinsip totem ini juga dapat menjelaskan setiap agama. Kepercayaan terhadap roh atau jiwa adalah sama saja dalam perspektif ini. Totemisme akan memperlihatkan bagaimana sebuah kepercayaan tumbuh dan berkembang. Ide tentang jiwa sebenarnya adalah prinsip-prinsip totem yang dicangkokkan kepada setiap individu (Durkheim, p. 154).

C. Totemisasi Kearifan Lokal pada Masyarakat Lampung

Setiap daerah memiliki bentuk kearifan lokal yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga fungsi kearifan lokal sebagai bentuk preventif konflik pun akan berbeda-beda. Di Maluku terdapat kearifan lokal yang disebut *pela* dan *gandong*. *Pela* lahir berdasarkan ikatan perjanjian persahabatan dan persaudaraan antara dua desa atau lebih, sedangkan *gandong* menyiratkan persahabatan yang terbentuk karena kesadaran genealogis (Goerge Junus Aditjondro, 2007, p. 310). Kemudian di Sulawesi, terutama di Poso (Sulawesi Tengah), terdapat kearifan lokal yang disebut *pekasimia* yang artinya penyamaan derajat. Ada juga *motambu tana* yang mendorong kemunculan rekonsiliasi, yaitu *mampaka simadago ne'emo ndapaupau anu liulmo* (saling berbaikan,

jangan lagi diungkit-ungkit persoalan yang sudah lewat). Selain itu, ada *sumpah porapa* yang merupakan perjanjian damai pasca terjadinya konflik. Selanjutnya, masyarakat adat Dayak Kalimantan memiliki adat *tamabang* yang merupakan sebuah ritual yang dilakukan ketika pihak yang bertikai sepakat mengadakan gencatan senjata. Kemudian ada tradisi *basaru/nyaru samangat* yang dimaksudkan untuk mengembalikan semangat-semangat positif seperti perdamaian, keamanan, dan ketenteraman yang sempat hilang setelah dihancurkan oleh konflik. (Goerge Junus Aditjondro, 2007, p. 79)

Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain: adat *beramai baakuran* (Kalimantan Selatan), *kerapatan kaum* (Sumatera Barat), *mulakbi* (Lampung), *setulung tiga batu* (Papua), *dalihan natolu* (Tapanuli, Sumatera Utara), *rumah betang* (Kalimantan Tengah), *menyama braya* (Bali), *saling jot* dan *saling pellarangan* (NTB), *siro yo insun, insun yo siro* (Jawa Timur), *alon-alon asal kelakon* (Jawa Tengah dan Yogyakarta), dan *basusun sirih* (Melayu/Sumatera). Kearifan-kearifan lokal ini masih ada serta berlaku di masyarakat dan berpotensi untuk mendorong kehidupan yang rukun dan damai (Fajri M Kasim, 2016, p. 102).

Selain dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan konflik yang terjadi di Lampung, kearifan lokal juga bisa menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di Lampung. Kearifan lokal masyarakat Lampung banyak mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan berdampingan, salah satunya tercermin dalam semboyan masyarakat Lampung *Sang Bumi Ruwa Jurai* yang artinya Satu Bumi Dua Jiwa. Semboyan itu juga bermakna identitas asli leluhur masyarakat Lampung. *Sang Bumi Ruwa Jurai* tidak hanya berfungsi sebagai semboyan masyarakat Lampung, namun lebih dari itu, semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai* menjadi cara atau strategi untuk mengurangi konflik yang ada di Lampung, yang notabene adalah salah satu provinsi yang rentan terjadi konflik.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Lampung pernah terjadi konflik, namun dengan adanya semboyan atau motto hidup masyarakat Lampung, yaitu *Sang Bumi Ruwa Jurai*, setidaknya masyarakat Lampung, baik asli maupun pendatang, menyadari bahwa meskipun ada perbedaan, hal itu tidak menyebabkan masyarakat Lampung yang berbeda untuk saling bertikai. Masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup bersama di tengah perbedaan.

Kearifan lokal seringkali mengandung aspek relasional atau pemersatu yang melampaui batas-batas agama, kepercayaan, ras, suku, kelompok, dan lain-lain. Kearifan lokal dapat dipersepsikan sebagai suatu tempat, ruang, atau arena dialog dalam rangka mengurangi berbagai bentuk klaim kebenaran dan eksklusivitas dalam kelompok masyarakat. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal, hal ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjembatani berbagai macam kepentingan yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik agar tidak menjadi lebih besar (Ruslan, 2018, p. 117).

Totem bukan hanya sekadar nama, melainkan sebuah lambang yang mirip dengan lencana pengenalan untuk menunjukkan identitas tertentu. Jika terdapat dekorasi-dekorasi totemik, hal ini menunjukkan bahwa totem bukan hanya sekadar nama atau lambang saja.

Kearifan lokal Lampung seperti *Sang Bumi Ruwa Jurai*, *Piil Pesenggiri*, dan *Ippun Aneng* mengandung nilai-nilai dan prinsip hidup rukun, gotong royong, toleransi, keterbukaan, musyawarah untuk mufakat, yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial. *Sang Bumi Ruwa Jurai*, *Piil Pesenggiri*, dan *Ippun Aneng* menjadi semacam totem bagi masyarakat Lampung. Nilai-nilai tersebut cocok diterapkan di Lampung yang multikultural dan rawan konflik.

Kearifan lokal berperan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Lampung akan pentingnya hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Hal ini tercermin dalam semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai*. Kesepahaman kolektif ini dapat mencegah munculnya konflik akibat sentimen perbedaan. *Piil Pesenggiri* dan *Ippun Aneng* merupakan solusi penyelesaian konflik secara adat dan kekeluargaan yang sudah mentradisi di Lampung. Penerapan kedua kearifan lokal ini secara preventif dapat mencegah konflik meluas dan meluas di masyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal dapat bekerja dengan baik jika selaras. Bahwa filosofi-filosofi indah hanya sekadar totem.

Teori Emile Durkheim, khususnya dalam konteks totemisme, dapat dikaitkan dengan kebudayaan lokal. Dalam totemisme, terdapat tiga objek yang dianggap kudus, yaitu totem, lambang totem, dan para anggota suku itu sendiri. Durkheim berpendapat bahwa totem bagi masyarakat primitif memiliki posisi yang sakral dan terisolasi dari hal yang profan. Dalam konteks kebudayaan lokal, konsep totemisme dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat mengaitkan kesakralan dengan objek-objek tertentu dalam lingkungannya, yang dapat memengaruhi praktik dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori Durkheim tentang totemisme dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara agama, masyarakat, dan kebudayaan lokal.

Dalam konteks yang lebih luas, teori Durkheim tentang solidaritas sosial juga dapat diterapkan dalam memahami pelestarian budaya lokal. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas sosial adalah suatu keadaan hubungan antarindividu dan kelompok dengan kesadaran masyarakat yang tinggi. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana masyarakat lokal menjaga dan melestarikan budaya mereka sebagai sumber solidaritas dan identitas kolektif. Dengan demikian, teori solidaritas sosial Durkheim dapat memberikan pemahaman tentang peran budaya lokal dalam mempertahankan solidaritas dan identitas masyarakat.

Dari sisi teori, dapat dilihat bahwa konsep totemisme dan solidaritas sosial dari Emile Durkheim relevan untuk memahami peran kearifan lokal sebagai perekat sosial dan identitas kolektif yang mencegah konflik. Namun, terlihat ada kesenjangan antara nilai-nilai luhur kearifan lokal Lampung dengan realitas konflik yang masih sering terjadi. Perlu ada internalisasi nilai dan edukasi tentang kearifan lokal agar dapat benar-benar dipraktikkan sebagai pencegah konflik.

Totem hanyalah sebuah mimpi dari masyarakat Lampung yang tidak bisa dipraktikkan. Kata-kata indah pada posisi tertentu bertindak sebagai bayangan-bayangan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat. Walaupun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam bentuk *local wisdom* memiliki makna yang baik, namun di Lampung tetap saja masih ada konflik yang terjadi. Hal ini dikarenakan falsafah tersebut hanya bertindak sebagai totem dalam masyarakat. Ada patahan antara kesadaran menjadi orang arif dan menjadi orang praktis (totemik).

Falsafah-falsafah tersebut indah dalam tulisan. Petuah-petitih yang hanya indah dalam panggung pertunjukan, namun tidak meresap menjadi kesadaran moral yang harus diemban sebagai manifestasi manusia yang memiliki kesadaran tinggi. Hanya sebagai berhala saja, namun berhala tersebut mampu menggerakkan, layaknya totem yang mampu menggerakkan. Kesadaran realitasnya berbeda dengan fakta karena bekerjanya totemik. Nilai **wisdom** hanyalah sebuah totemik, yaitu sebagai identitas kelampungan, namun tidak bisa difungsikan dalam kehidupan masyarakat karena mereka masih berada dalam ruang mitos dan tidak bisa memfungsikannya dalam rasionalitasnya.

Kearifan lokal masyarakat Lampung dianggap sebagai totemik benda-benda yang disakralkan yang seharusnya memiliki kemampuan mendorong nilai-nilai sosial. Di mana kearifan lokal tersebut dianggap memiliki pengaruh, namun ada kalanya totemik tidak mampu menggerakkan. Masyarakat Lampung memiliki kearifan lokal yang mengandung makna-makna yang baik, namun dalam praktiknya masih sering terjadi konflik. Hal ini dikarenakan adanya disfungsi.

Durkheim menjelaskan ikatan sosial dalam suatu harga adanya hal-hal yang magis, yaitu totemik. Totem adalah benda yang disakralkan yang diisi oleh magis yang sakral. *Local wisdom* adalah nilai sosial, yaitu tata laku yang tidak bisa berfungsi sangat kuat saat ada kompetisi yang sangat tajam. Mereka lupa akan nilai-nilai lokal tersebut karena disfungsi yang diakibatkan oleh masyarakat Lampung yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal hanya sebagai kebanggaan atau kebanggaan saja, namun nilai-nilai tersebut tidak mampu membawa pengaruh untuk berperilaku pada masyarakat.

Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana meresapi nilai-nilai lokalitas dalam sosial. Seharusnya orang yang memiliki kesadaran bahwa harus dilakukan tanpa harus ada totemik.

Ada totem untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik. Disfungsi yang terjadi karena masyarakat masih terjat dalam mitos sehingga tidak bisa merasionalkan, di mana masyarakat masih menjadikan budaya menjadi sebuah kepuasan bagi orang Lampung, bukan sebagai sesuatu yang baik bagi orang Lampung. Nilai-nilai lokalitas hanya menjadi pemuas dan kelengkapan bagi orang Lampung, tidak dijadikan sebagai fungsi yang difungsikan sebagaimana totem menurut Durkheim.

Indahnya *local wisdom*, namun tidak bisa bekerja secara efektif mengharmoniskan masyarakat yang multietnis. Nilai *wisdom* hanyalah sebuah totemik yang bangga sebagai identitas kelampungan, namun tidak bisa difungsikan dalam kehidupan karena mereka masih berada dalam ruang mitos dan tidak bisa memfungsikannya dalam rasionalitasnya. Menurut Durkheim, ada rasional untuk mencapai kohesi sosial. Namun masyarakat belum rasional karena belum bisa meninggalkan keidentitasan mereka.

Untuk bisa menjadikan nilai-nilai *local wisdom* berguna untuk mengatasi konflik yang ada, maka totemik harus berubah menjadi pendidikan. Perlunya pendidikan tentang *local wisdom*, bukan sebagai kebanggaan atau kebanggaan, namun sebagai cara untuk menyelesaikan konflik melalui nilai-nilai yang tepat yang menuruti ekologi di Lampung.

Penutup

Kearifan lokal Lampung mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat Lampung. Beberapa contoh kearifan lokal Lampung antara lain semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai*, *Piil Pesenggiri*, dan *Ippun Aneng*. Dengan menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal tersebut, diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial di tengah masyarakat Lampung yang majemuk. Sehingga, kohesi sosial tetap terjaga dan kearifan lokal Lampung tetap lestari sebagai perekat sosial. Meskipun *local wisdom* terlihat indah, namun tidak bisa bekerja secara efektif untuk mengharmoniskan masyarakat yang multietnis. Nilai *wisdom* hanyalah sebuah totemik, yaitu sebagai identitas kelampungan, namun tidak bisa difungsikan dalam kehidupan masyarakat karena mereka masih berada dalam ruang mitos dan tidak bisa memfungsikannya dalam rasionalitasnya. Untuk bisa menjadikan nilai-nilai *local wisdom* berguna dalam mengatasi konflik yang ada, maka totemik harus berubah menjadi pendidikan. Perlunya pendidikan tentang *local wisdom*, bukan sebagai kebanggaan atau kebanggaan, namun sebagai cara untuk menyelesaikan konflik melalui nilai-nilai yang tepat yang sesuai dengan ekologi di Lampung.

Daftar Pustaka

- Amirrachman, Alpha. (2007). *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP.
- Astri, Herlina. (2011). "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal." *Aspirasi*, Vol. 2, No. 2.
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/> diakses pada 25/11/2023 pukul 17:27.
- Sriyanto, Agus. (2007). "Penyelenggaraan Konflik Berbasis Budaya Lokal." *Ibda': Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5, No. 2.
- Minandar, Camellia Arni. (2019). "Aktualisasi Piil Pesenggiri Sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau." *Sosietas*, Vol. 8, No. 2.
- Ruslan, Idrus. (2018). "Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik." *Kalam*, Vol. 12, No. 1: 105-126.
- M Kasim, Fajri dan Abidin Nurdin. (2016). "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi Tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe." *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. 1: 101-118.
- Saepudin, Asep. (2017). "Model Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Preventif Konflik di Yogyakarta." Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta.

- Salim, Luthfi. (2023). "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Ulun Lampung." *Resiprokal*, Vol. 5, No. 1.
- Savickas, Alfonsas. (1980). *The Concept of SYMBOL in the Psychology of C.G. Jung*. Innsbruck: Resch Verlag.
- Suwardi, M. Ruhly Kesuma Dinata. (2021). "Pencegahan Konflik Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Prinsip Nemui Nyimah pada Masyarakat Lampung Nyunyai." *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50, No. 1: 1-16.
- Thayer, Joseph Henry. (1981). *A Greek English Lexicon of the New Testament*. Michigan: Zondervan Publishing House.
- Zarkasi, Ahmad. (2014). *Islam dan Budaya Lampung (Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal)*. Lampung: Aura Publishing.